



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PENNY KUSUMASTUTI LUKITO
2. Jabatan : KEPALA BADAN POM
3. NHK : 21623

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 769.900.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 60.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI SANTA FE GASOLINE 2500 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
3. MOTOR, GESITS SPEDA MOTOR LISTRIK G1 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 24.950.000
4. MOTOR, GESITS SPEDA MOTOR LISTRIK G1 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 24.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 314.500.000**D. SURAT BERTAHAP** Rp. 2.963.166.777**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.970.672.067**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 19.568.238.844**III. HUTANG** Rp. 1.299.478.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 18.268.760.844



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.